



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN
ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai kekuasaan membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pj. Bupati Aceh Timur Nomor 180.8/4037 tanggal 28 Mei 2024 M/19 Dzulqaidah 1445 H tentang Usulan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa untuk membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur sebagai pelaksanaan fungsi legislasi dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif dan partisipatif dalam suatu Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur;
 - d. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Judul Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kab dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Judul Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Legislasi dan Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan dalam rangka proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA** : Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang dalam lampiran keputusan ini menjadi tanggung jawab Bupati Aceh Timur.
- KEEMPAT** : Bupati Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam proses penyiapan dan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
pada tanggal 15 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,


FATTAH FIKRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 11 TAHUN 2024
 TANGGAL : 15 Juli 2024 M
 9 Muharram 1446 H

DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN ACEH TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH TEKNIS
			BARU	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok	• Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. • Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. • Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. • Mengatur tentang kawasan tanpa rokok serta informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat.	√ Bupati		Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Aceh Timur	• Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemebrian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. • Mengatur tentang pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	√ Bupati		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur

1	2	3	4	5	6
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur	• Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. • Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. • Mengatur tentang perubahan atas nomenklatur Badan Perencanaan tentang Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.	√ Bupati		Bagian Organisasi Setdakab Aceh Timur
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	• Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. • Mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Timur.	√ Bupati		Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur

1	2	3	4	5	6
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. • Mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Yang Memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025-2045.			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,


FATTAH FIKRI